

# Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi

Siti Aminah

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## Abstract.

This study aimed to analyze the effect of private investment and local government spending to economic growth and poverty in Jambi Province. Research using time series data from 1985 to 2012 year. The analytical tool used is regression by the method of "Ordinary Least Squares" (OLS). The findings of this study show that private investment and local government spending made a positive impact on economic growth Jambi Province.

*Keywords: economic growth, poverty, investment, government expenditure*

## Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi swasta dan belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan data runtut waktu tahun 1985-2012. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan metode "*Ordinary Least Square*" (OLS). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi swasta dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

*Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, investasi, pengeluaran pemerintah*

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada, yang pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran suatu bangsa dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan di Provinsi Jambi yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Provinsi Jambi masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menekan angka kemiskinan di Indonesia, maka Jambi sebagai salah satu provinsi perlu dilakukan kajian tentang pertumbuhan dan kemiskinan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan berbagai program pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Perbaikan angka kemiskinan wilayah, tentu akan berpengaruh terhadap perbaikan angka kemiskinan nasional.

Untuk menggairahkan kemajuan perekonomian baik nasional maupun Daerah, tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Sektor swasta harus semakin diberi porsi yang lebih besar. Hal ini, mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang sangat terbatas. Seperti apa yang dikatakan oleh Tambunan (2010), bahwa dalam kondisi kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas, sangat sukar membayangkan pemerintahan nasional dapat menutupi kepincangan fiskal dalam waktu dekat, kecuali investasi swasta dapat ditarik ke pasar atau pada ekonomi Daerah yang miskin penerimaan (revenue). Selanjutnya Tambunan (2010) mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan regional, investasi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Iklim usaha dan investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan usaha yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modalnya di daerah baik yang berasal dari dalam

dan luar daerah maupun asing. Dengan meningkatnya investasi swasta, diharapkan akan dapat mengatasi keterbatasan pemerintah, yang selanjutnya akan semakin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya untuk meningkatkan minat investor, baik dalam, luar daerah dan asing untuk menanamkan modalnya di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi selalu gencar melakukan promosi potensi daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Perkembangan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jambi; 2) Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi; 3) Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

## METODE

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dihitung dari tahun 1985 – 2012, mencakup 1) PDRB Provinsi Jambi; 2) Investasi swasta Provinsi Jambi; 3) Pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Jambi; 4) Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi.

Data diperoleh dari lembaga atau instansi resmi pemerintah, antara lain: 1). Badan Pusat Statistik; 2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal

### Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan berdasarkan perkembangan data yang dianalisis secara deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual mengenai gejala-gejala dan fakta-fakta serta fenomena dari data yang dianalisis, serta untuk menjelaskan mengenai gambaran perkembangan dari setiap variabel penelitian.

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{LogPDRB} = \text{LogA} + 1 \text{ LogI} + 2 \text{ Log G}$$

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menggunakan persamaan :

$$\text{LogK} = \text{LogA} + 1 \text{ LogI} + 2 \text{ Log G}$$

Dimana :

K = Tingkat Kemiskinan

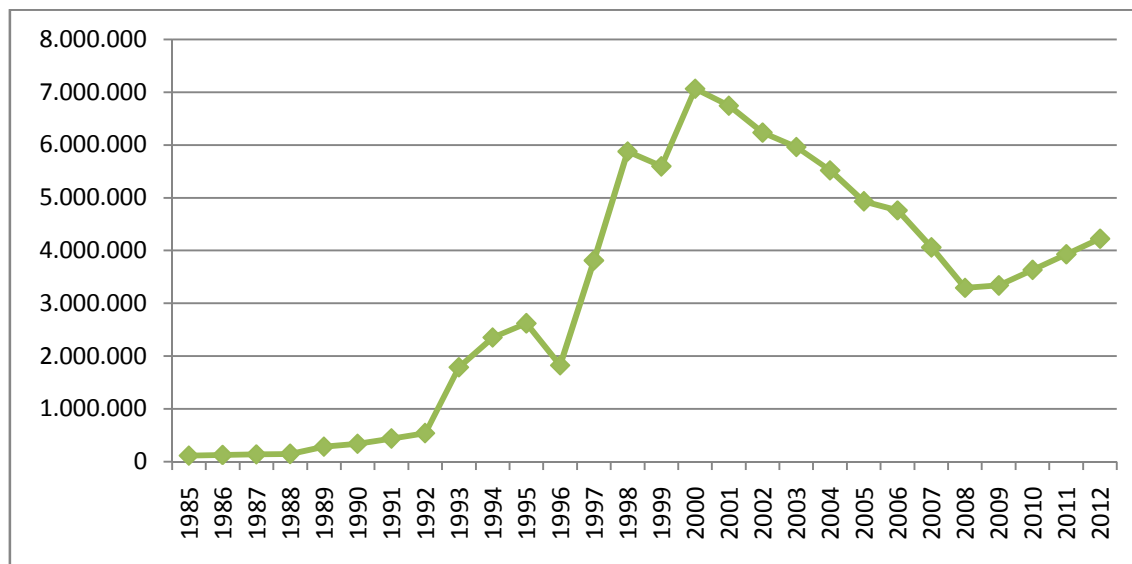
I = Investasi Swasta

G = Pengeluaran Pemerintah Daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Investasi Swasta di Provinsi Jambi

Investasi di Provinsi Jambi sejak tahun 1985 hingga 1995 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya iklim perekonomian yang cukup baik. Investasi cenderung dipengaruhi oleh variabel makroekonomi lainnya, tapi variabel yang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya investasi yang ditanamkan adalah tingkat kepercayaan.



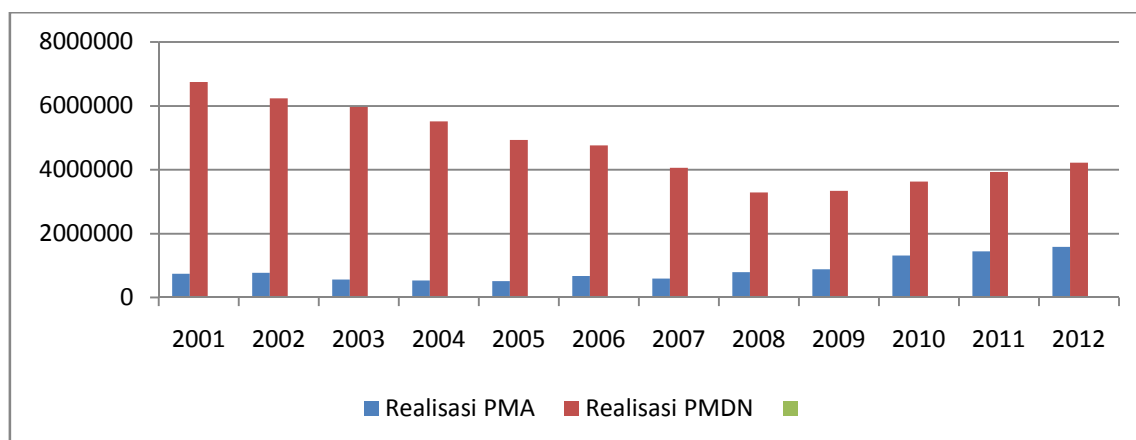
**Gambar 1. Perkembangan Investasi Swasta di Provinsi Jambi, Tahun 1985 – 2012 (Rp Juta)**

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997, terjadi pergolakan yang sangat dasyat yang mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, krisis ini bukan hanya berpengaruh pada kondisi perekonomian, namun di semua bidang, krisis ini membawa Indonesia ke pada krisis multidimensi. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan investor baik investor asing maupun dalam negeri terhadap Indonesia menjadi sangat berkurang, sehingga jumlah investasi menjadi turun. Pasca krisis dari tahun 1998 sampai 1999 investasi terus saja mengalami penurunan, yang terparah adalah pada tahun 1999, jumlah investasi yang masuk hanya Rp 231.785,4 milyar. Setelah tahun 2000 investasi kembali mengalami peningkatan.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Jambi, Investasi mengalami penurunan mulai tahun 1996 secara berfluktuatif antara tahun 1996 – 1999 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,48 %. Tahun 2000, investasi mengalami peningkatan sebesar 26,26 %. Sedangkan tahun 2001 – 2008, investasi mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,95 %. Tetapi pada tahun 2009 – 2011, adanya kecenderungan peningkatan investasi sebesar 6,46 %.

Perkembangan realisasi investasi swasta asing dan domestik di Provinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 2001-2010 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu rata-rata per tahun adalah sebesar 7,29 persen atau sebesar Rp. 736.933 juta per tahun. Investasi domestik menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu mengalami penurunan sebesar 6,44 persen per tahun. Karena peranan investasi domestik yang lebih besar dari investasi asing, maka secara total investasi swasta selama periode tahun 2001-2010 mengalami penurunan sebesar 4,45 persen per tahun. Investasi swasta domestik memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap

investasi swasta dibandingkan dengan investasi asing. Selama periode tahun 2001-2010 investasi domestik memberikan kontribusi rata-rata sebesar 86,80 persen, sedangkan investasi swasta asing, hanya rata-rata sebesar 13,20 persen per tahun.



**Gambar 2. Realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Jambi, Tahun 1985 – 2012**

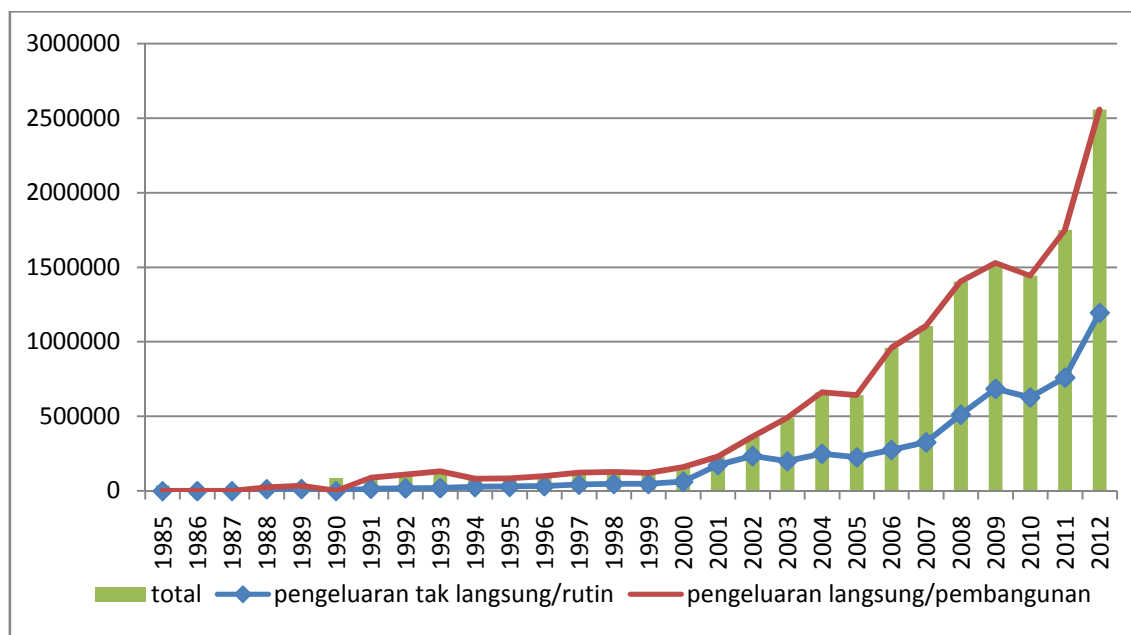
Beberapa masalah ekonomi makro yang perlu diantisipasi pada tahap awal pembangunan daerah adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang diikuti dengan menurunnya tingkat output, daya serap tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu kebijakan strategis yang dapat dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dan juga dalam upaya mempercepat laju perekonomian makro daerah adalah melalui peningkatan investasi swasta, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bentuk investasi langsung. Guna menarik minat investor untuk berinvestasi diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi di mana hal ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan suatu daerah. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif, akan memungkinkan suatu daerah untuk memacu daya tumbuh perekonomiannya. Peringkat daya saing investasi daerah Provinsi Jambi ditujukan untuk memberikan informasi mengenai peringkat daya saing investasi suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Survei peringkat daya saing investasi daerah ini dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi agar didapatkan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi iklim investasi untuk semua kabupaten kota.

#### **Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi**

Pada tahun 1985 total pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp 37.078,206 juta, namun pada tahun 1986 mengalami penurunan menjadi Rp 24.264,083 juta. Namun pada tahun 1989 – 1993 pengeluaran pemerintah daerah rata-rata meningkat. Tahun 1994 pengeluaran pemerintah daerah mengalami penurunan 38,26 %. Dari tahun 1995 sampai tahun 2000 pertumbuhan pengeluaran pemerintah rata-rata plus kecuali tahun 1999 mencapai minus 4,04.

Sebagai implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk tujuan penyederhanaan, maka dalam penelitian ini Penulis mengasumsikan, dengan mensejajarkan/menyamakan istilah (pengeluaran rutin = belanja aparatur = belanja tidak langsung) pada satu pihak, dan pengeluaran pembangunan = belanja pelayanan publik = belanja langsung, pada pihak lain.

Selama periode 2001-2010 pengeluaran negara untuk Daerah mengalami peningkatan sebesar 17.96 persen per tahun (BPS, 2003-2010). Sejalan dengan peningkatan pengeluaran untuk daerah, maka pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan peningkatan pengeluarannya dengan berbagai program pembangunannya. Bila diamati selama periode 2001-2010, maka disamping terjadi peningkatan pengeluaran, struktur pengeluaran juga mengalami perbaikan sejak tahun 2003, dimana dua tahun sebelumnya pangsa pengeluaran Tidak Langsung atau Rutin (istilah lama) masih lebih besar dari pengeluaran Langsung (pembangunan).



**Gambar 3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 1985 - 2012**

Realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 27 persen per tahun selama periode tahun 2001-2010 yaitu dari Rp. 229 Milyar tahun 2001 menjadi Rp.1.487 Milyar tahun 2010. Pada tahun 2001 alokasi untuk Belanja Rutin sebesar Rp 173 Milyar atau 76 persen dan Belanja Pembangunan 56 Milyar Rupiah atau 24 persen. Pada tahun 2010 Belanja Langsung sebesar 815 Milyar Rupiah atau sebesar 55 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar Milyar 672 Rupiah atau sebesar 45 persen. Hal ini memberikan indikasi semakin membaiknya alokasi dana untuk pembangunan di daerah Jambi.

### **Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi data yang digunakan adalah data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun berdasarkan atas harga konstan. Data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 1985-2012 yang ditunjukkan oleh BPS Provinsi Jambi dapat dilihat Tabel 5.3.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 1997 sampai tahun 2000 senantiasa mengalami penurunan. Bahkan akibat krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus sebesar 5,41 persen. Pertumbuhan negatif pada tahun tersebut disebabkan karena pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa-jasa tetap mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 1998. Bahkan untuk sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu dari 14,90 persen pada tahun 1997 menjadi 53,19 persen pada tahun 1998. Begitu juga dengan sektor listrik, gas dan air bersih, pertumbuhan ekonomi tahun 1996 sebesar 4,92 persen, kemudian meningkat menjadi 10,80 persen pada tahun 1998. Pada tahun 2004, sektor pertanian tumbuh sebesar 5,13 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2003 yang mencapai 3,56 persen. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor ini disebabkan naiknya laju pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan dan peternakan, sedangkan sub sektor kehutanan masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 8,39 persen. Sementara itu, sub sektor perikanan mengalami laju pertumbuhan dari 8,47 persen menjadi minus 0,58 persen. Pada tahun 1997 sub sektor kehutanan tumbuh sebesar 3,48 persen turun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,64 persen. Dengan adanya krisis ekonomi, pertumbuhan sub sektor ini semakin mengalami penurunan bahkan mencapai nilai negatif yaitu sebesar minus 19,36 persen pada tahun 1998. Pertumbuhan minus terjadi pada sub sektor kehutanan tahun 1998 sampai 2005.

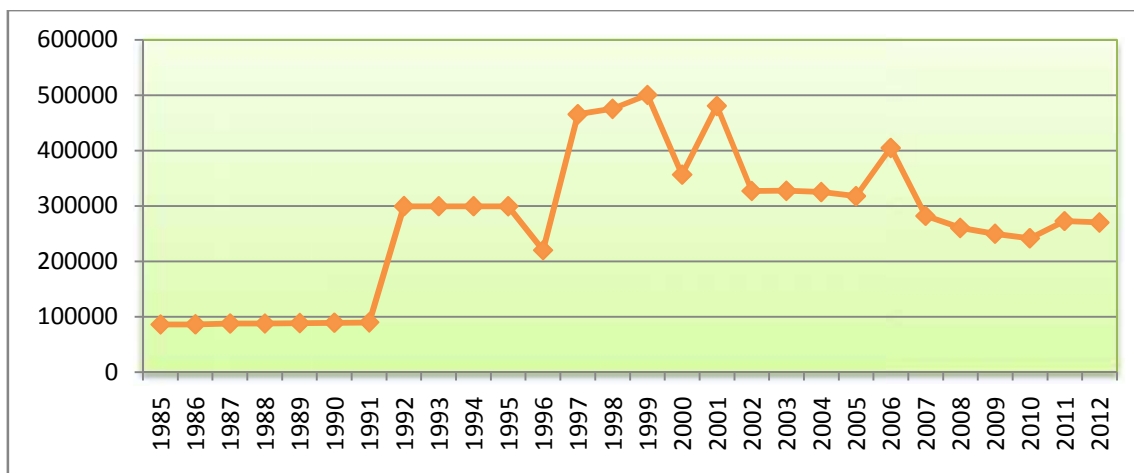
Selama periode tahun 2001-2010 perekonomian Jambi selalu tumbuh di atas lima persen per tahun. Selama periode tahun tersebut rata-rata pertumbuhan per tahun adalah sebesar 6.20 persen. PDRB Provinsi Jambi meningkat dari Rp. 10.205.592 juta tahun 2001 menjadi Rp. 17.465.000 juta. PDRB sektor pertanian meningkat dari Rp. 3.193.569 juta menjadi Rp. 4.417.948 juta tahun 2010, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.52 persen per tahun. PDRB sektor industri mengalami peningkatan dari Rp. 1.459.247 juta menjadi 1.981.556 juta, atau meningkat rata-rata sebesar 4,74 persen per tahun. PDRB sektor jasa mengalami peningkatan dari Rp.3.743.991 juta menjadi Rp. 5.459.122 juta atau meningkat rata-rata sebesar 8,21 persen. PDRB sektor lainnya mengalami peningkatan dari Rp. 1.808.786 juta tahun 2001 menjadi Rp.2.458.586 juta tahun 2010 atau meningkat sebesar 8,21 persen per tahun, sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya selama periode tersebut.

Bila dilihat penyebaran per sektor maka, PDRB sektor jasa merupakan yang memberikan kontribusi yang terbesar selama periode tahun 2001-2010 yaitu rata-rata per tahun sebesar 36,89 persen. Pada urutan kedua ditempati oleh PDRB sektor pertanian yaitu sebesar 28,02 persen per tahun. Berikut adalah PDRB sektor yang lainnya sebesar 22,77 persen per tahun, dan terakhir adalah PDRB sektor industri sebesar 12,32 persen per tahun. Selain dari PDRB sektor yang lainnya, selama periode tahun 2001-2010 mengalami penurunan kontribusi. PDRB sektor pertanian turun dari 30,55 persen tahun 2001 menjadi 29,56 persen tahun 2010.

### **Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi**

Sebelum terjadi krisis ekonomi pada pertengahan 1997 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Seperti terlihat pada Gambar 4.4, dari tahun 1985 sampai 1996 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Saat terjadi krisis jumlah penduduk miskin melonjak secara drastis, dan kemudian kembali mengalami penurunan.

Krisis moneter dan dampak bencana alam yang telah melanda Indonesia telah menyebabkan kegiatan ekonomi nasional mengalami kemunduran dan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak dari krisis tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, antara lain terganggunya kegiatan produksi, distribusi, ketersediaan pangan dan tingkat tukar mata uang Indonesia yang labil. Hal ini mengakibatkan naiknya harga kebutuhan hidup termasuk sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), semakin sempitnya kesempatan kerja yang pada akhirnya menyebabkan daya beli dan pendapatan masyarakat menurun. Menurunnya pendapatan penduduk secara otomatis telah menurunkan kondisi sosial dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.



**Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 1985 - 2012**

Pada tahun 2001 penduduk miskin di Provinsi Jambi sebanyak 480.400 jiwa atau meningkat menjadi 34,83%, lalu turun sebesar -31,95 persen menjadi 326.910 jiwa atau . Penurunan angka kemiskinan terus berlangsung, sehingga pada tahun 2009, angka kemiskinan sebesar 249.690 ribu jiwa. Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Jambi masih tercatat sebesar 241.600 ribu jiwa atau berkurang menjadi 3,24 persen. Selama periode tahun 2001-2010, angka kemiskinan hanya mengalami penurunan rata-rata sebesar 0.07 persen per tahun.

#### **Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi**

Hasil estimasi model persamaan regresi pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:

$$\text{Log PDRB} = 2,081 + 0,397\text{Log I} + 0,506\text{Log G} + \text{et}$$

t =	4,046**	8,658**	6,649**	Adj.R <sup>2</sup> = 0,942
				d.f. = 25
				F = 219,196**

\*\* = signifikan pada = 1%

Berdasarkan uji F terlihat bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat = 1%. Selanjutnya nilai Adjusted R<sup>2</sup> mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,942 artinya bahwa 94,2 % variasi pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel investasi swasta dan pengeluaran



pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 5,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa model yang digunakan dalam analisis ini cukup baik untuk mengestimasi parameter-parameter variabel yang diikutsertakan berdasarkan data yang ada.

Berdasarkan uji t terlihat bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, masing-masingnya pada tingkat  $\alpha = 1\%$ . Secara matematis nilai estimator masing-masing variabel merupakan pengukur elastisitas pertumbuhan terhadap perubahan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah. Dengan memperhatikan koefisien elastisitas masing-masing variabel, dapatlah diketahui persentase pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah yang dihasilkan sebagai berikut :

- Variabel investasi swasta memiliki nilai  $\beta_1$  sebesar 0,397, hal ini berarti peningkatan investasi swasta sebesar 1 % akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,397 % dengan asumsi pengeluaran pemerintah konstan.
- Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai  $\beta_2$  sebesar 0,506, hal ini berarti peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 % akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,506 % dengan asumsi investasi swasta konstan.
- Variabel investasi swasta mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,397 terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,506 terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan investasi swasta.

### **Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi**

Hasil estimasi model persamaan regresi pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{llll} \text{Log PDRB} = 0,763 + 0,478\text{Log I} - 0,1106\text{Log G} + \text{et} & \text{Adj.R}^2 = 0,864 \\ t = \quad \quad 1,971^* \quad 10,631^{**} \quad \quad -2,503^* & \text{d.f.} = 25 \\ & F = 86,540^{**} \end{array}$$

\*\* = signifikan pada  $\alpha = 1\%$

\* = signifikan pada  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji F terlihat bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat  $\alpha = 1\%$ . Nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,864 artinya bahwa 86,4 % variasi variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 13,6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa model yang digunakan dalam analisis ini cukup baik untuk mengestimasi parameter-parameter variabel yang diikutsertakan berdasarkan data yang ada.

Berdasarkan uji t terlihat bahwa secara parsial investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pada tingkat  $\alpha = 1\%$ , sedangkan pengeluaran pemerintah secara parsial signifikan pada  $\alpha = 10\%$ . Secara matematis nilai estimator masing-masing variabel merupakan pengukur elastisitas tingkat kemiskinan terhadap perubahan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah. Dengan memperhatikan

koefisien elastisitas masing-masing variabel, dapatlah diketahui persentase pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah yang dihasilkan sebagai berikut :

- Variabel investasi swasta memiliki nilai  $\epsilon_1$  sebesar 0,478, hal ini berarti peningkatan investasi swasta sebesar 1 % akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,478 % dengan asumsi pengeluaran pemerintah konstan.
- Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai  $\epsilon_2$  sebesar -0,110, hal ini berarti peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 % akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,110 % dengan asumsi investasi swasta konstan.
- Variabel investasi swasta mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,478 terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar -0,110 terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dibandingkan dengan investasi swasta. Malah investasi swasta ada kecenderungan berbanding lurus dengan kemiskinan, artinya penambahan investasi swasta 1 % mengakibatkan penambahan kemiskinan sebesar 0,478 %.

Fokus pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan pada masa reformasi sampai saat ini juga dapat dilihat dari perkembangan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membuat program pengentasan kemiskinan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Jambi.

Pada fase reformasi upaya pengentasan kemiskinan mulai mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi ini terbukti dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan misalnya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri), bantuan langsung tunai PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan) dan lain-lain. Ini dilihat sebagai upaya terstruktur pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Jambi.

Selain itu pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di Provinsi Jambi. Dengan kata lain dampak langsung pengeluaran pemerintah adalah manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan target penduduk miskin.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Artinya kedua variabel independen ini dapat dijadikan instrument untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi meskipun masih banyak variabel lain yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Membandingkan investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan investasi swasta.

### Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan investasi swasta cenderung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang sangat kuat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Dengan demikian, maka variabel investasi pemerintah ini patut diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Strategi pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, harus dilakukan dengan cara meningkatkan realisasi investasi swasta, baik asing maupun domestik, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi mampu berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan investasi swasta akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah lebih efektif dibandingkan dengan peningkatan investasi swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. (2007). *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Globalisasi*. Biografika. Bogor
- Agussalim, (2006), *Mereduksi kemiskinan; sebuah proposal baru untuk Indonesia*, Nala Cipta Litera
- Basri, Faisal dan Munandar, Haris. (2009). *Lanskap ekonomi Indonesia; kajian dan renungan terhadap masalah-masalah struktural, transformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia*. Kharisma Putra Utama
- Hadi, Agus Purbathin. (2008). *Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*.
- Anonimous. *Jambi dalam angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi 1985 -2012
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan & Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Jambi*. Data Agregat Per Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2003). *Jambi Dalam Angka* . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi
- Basri, Faisal, (2002), *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Basuki, (1997). *Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun*

- 1969-1994. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.12,2,50-65, Universitas Gajah Mada
- Boediono. (1998). *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis, Pengantar Ilmu Ekonomi* No.4. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2005). *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta : LPUAJ
- Cahyat, Ade, (2000), *Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia)*, Center for International Forestry Research.
- Djojohadikusumo, Soemitro. (1998). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3S, Jakarta
- Dumairy, (1997). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Guritno Mangkoesobroto. (1993). *Ekonomi Publik. Ed. 3*, Yogyakarta: BPFE
- Herlambang dkk. (2001). *Ekonomi Makro Teori, Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Junaidi, J. (2014). Regresi dengan Microsoft Office Excel. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Junaidi, J. (2015). Bentuk Fungsional Regresi Linear (Aplikasi Model dengan Program SPSS). Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Kuncoro, Mudrajad, (2003), *Ekonomi Pembangunan-Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Mankiw, N.Gregory. (2000). *Teori Makro Ekonomi.Ed.4*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 119-128.
- Pancawati, Neni, (2000). *Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia* ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.15, No.02, Universitas Gajah Mada
- Prasasti, Diah, (2006). *Perkembangan PDRB per kapita 30 Provinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi* ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21, No.4, Universitas Gajah Mada
- Ravallion, Martin.(1997).Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?.*Economics Letters* 56:51-57.
- Samuelson, Paul, A. dan William D. Nordhaus. (1996). *Makro Ekonomi* (Terjemahan). Edisi Keempat Belas. Jakarta: Erlangga.
- Sudarmanto, R. Gunawan. (2005). *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*.Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, (1999). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta
- Sukirno, Sadono.2004 *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran DariKlasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka
- Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000.
- Susanti, Hera, Moh.Ihsan dan Widyanti. (1995). *Indikator-Indikator Makro ekonomi*, Jakarta, LPEM-FE-UI
- Tambunan, M. (2010). Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan. Menggerakkan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Todaro , Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan,